

ESAI-ESAI
UNTUK
FRANZ MAGNIS-SUSENO

SESUDAH FILSAFAT



EDITOR: I WIBOWO & B HERRY PRIYONO

SESUDAH FILSAFAT

Pada 26 Mei 2006 Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Selama jangka waktu itu, 40 tahun lebih dilewatkan di Indonesia, mendidik para mahasiswa di bidang filsafat, di sebuah sekolah yang ia dirikan, STF Driyarkara, Jakarta. Buku ini merupakan ungkapan syukur dan terima kasih dari beberapa bekas muridnya yang telah menghirup filsafat dan menjadikan nafas mereka, baik yang kemudian menjadi filsuf maupun yang memasuki cabang pengetahuan lain.

...

"Pada mulanya Romo Magnis hanya sebuah nama, sampai kami menjadi murid-muridnya di STF Driyarkara, sebuah Akademi Filsafat yang ikut ia dirikan pada tahun 1969, dan ikut ia rawat sampai hari ini dengan ketelitian seorang penjaga malam. Untuk apa? Yang tak mungkin ia sembunyikan adalah cita-citanya mendidik para muridnya berpikir; dan berpikir secara ketat. Dalam kelakar ia sesekali berujar, yang kira-kira dapat diringkas begini: 'berpikir bukan tindak kriminal'."

— KATA PENGANTAR

"Ia aktif dalam segala ikhwal dunia ini. Mulai dari keintelektualan, sampai dengan turun ke jalan, memperjuangkan hak asasi dan demokrasi. Ia tidak pernah tinggal diam dalam ketentraman. Apa saja bisa menjadi keresahan dan pergulatannya. ... Ia melakukan semuanya itu, seakan-akan di sanalah ia dapat menemukan hakekat dirinya dan memberikan dirinya, komitmennya secara total. Seakan-akan di sanalah, ia dapat mengabdikan Tuhannya. Sesungguhnya itu semua bukan 'seakan-akan', tapi sungguhan."

— SINDHUNATA

PARA PENULIS KARANGAN

**Sindhunata * A. Sudiarja * G. Budi Subanar * B. Herry-Priyono
I. Wibowo * Robert H. Imam * Baskara T. Wardaya
F. Budi Hardiman * Eddy Kristiyanto * J. Hartono Budi
P. Hary Susanto * Simon-Petrus L. Tjahjadi**

ISBN 979-21-1381-9

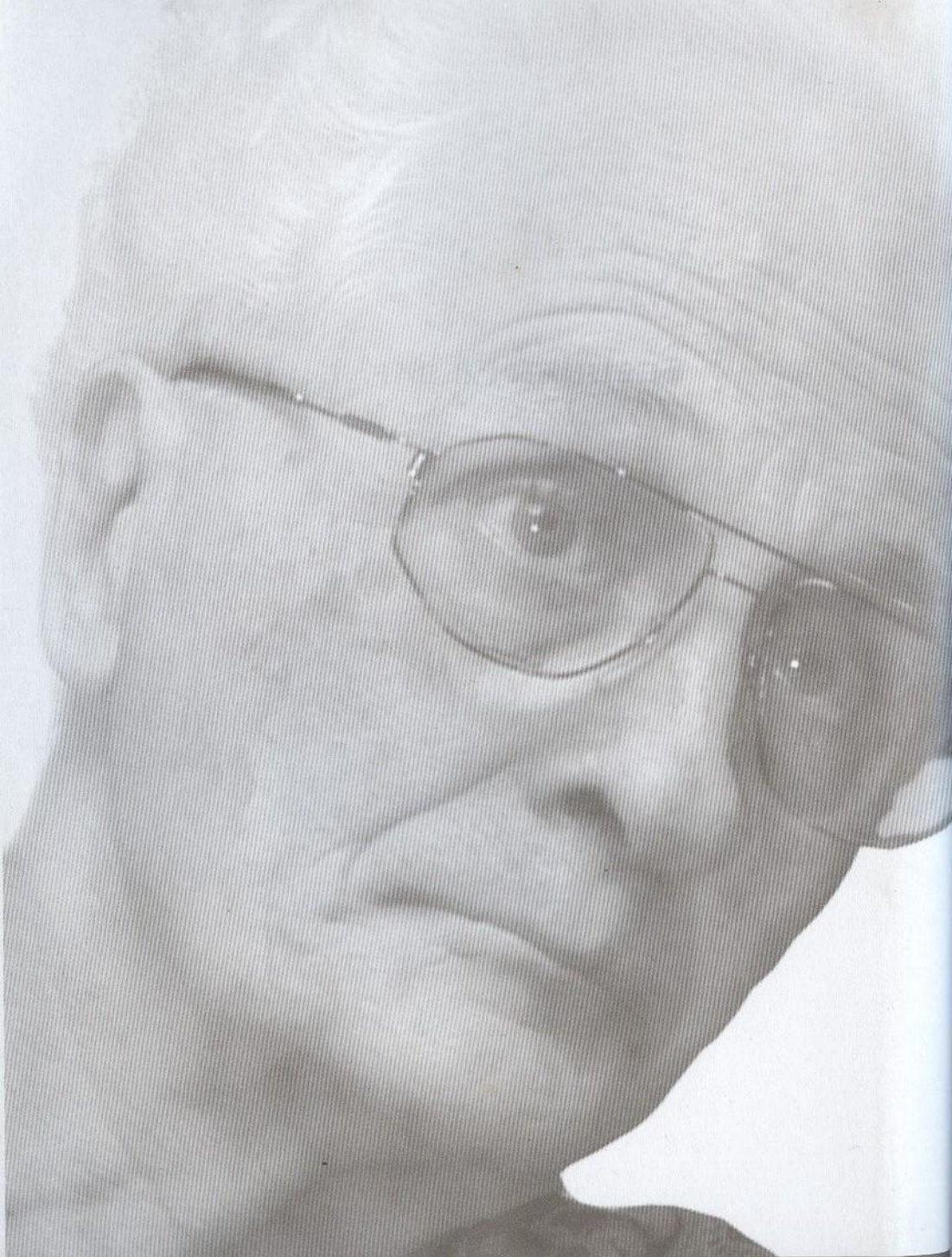


9 789792 113815

PENERBIT KANISIUS
Jl. Cempaka 9, Deresan
Yogyakarta 55281



027812



PROF. DR. FRANZ MAGNIS-SUSENO

SESUDAH FILSAFAT

Esai-Esai untuk Franz Magnis-Suseno

EDITOR:

I. Wibowo & B. Herry-Priyono



PENERBIT KANISIUS

Sesudah Filsafat

Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno

027812

© Kanisius 2006

PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281

Kotak Pos 1125/k, Yogyakarta 55011

Telepon (0274) 588783 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

Cetakan ke-	5	4	3	2	1
Tahun	10	09	08	07	06

Desain sampul oleh Hari Budiono

Lukisan pada sampul oleh Suatmaji

Karikatur oleh Adinto Fajar, SJ

ISBN 979-21-1381-9

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Kata Pengantar	vii
I. WIBOWO & B. HERRY-PRYONO	
1. Terang yang Tersembunyi dalam Kegelapan	1
G.P. SINDHUNATA	
2. Norma-Norma di Taman Etika	29
A. SUDIARJA, SJ	
3. Manunggaling Kawula-Gusti dalam Transisi	59
G. BUDI SUBANAR	
4. <i>Homo Oeconomicus</i> : Dari Pengandaian ke Kenyataan	87
B. HERRY-PRYONO	
5. Demokrasi dan Kapitalisme: Dua Obat Mujarab untuk Sekali Tengak?	133
I. WIBOWO	
6. Globalisasi: Proses dan Wacana Kompleks serta Konflikual	163
ROBERT H. IMAM	

7. Perang Dingin dan Reinterpretasi Sejarah Indonesia	191
BASKARA T. WARDAYA, SJ	
8. 'Manusia' dari Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Kontroversi antara Islam dan Barat	211
F. BUDI HARDIMAN	
9. <i>Tarian Ecclesiae Agonia</i>	239
EDDY KRISTIYANTO, OFM	
10. Iman, Rasionalitas, dan Belarasa: Teologi-Teologi Sosial Masa Kini	277
HARTONO BUDI, SJ	
11. Memeluk Agama, Menemukan Kebebasan: Mircea Eliade tentang Manusia Arkhais	301
HARY SUSANTO, SJ	
12. Allah Para Filsuf: Hegel dan Feuerbach tentang Yang Absolut	335
SIMON-PETRUS L. TJAHJADI, Pr.	
Indeks	371
Riwayat Hidup	375
Biodata Penulis	377

KATA PENGANTAR

Sesudah Filsafat

Selama bulan Oktober 2003, pengusuran kaum miskin di Jakarta berjalan bengis. Pada temaram suatu malam di awal bulan berikutnya, dalam suasana pengusuran yang makin kalap, dua orang yang mendampingi kaum tergusur datang menemui dua rekannya yang dosen di Program Pasca-Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Mereka terbata-bata sambil coba menemukan kata yang mungkin bisa menghubungkan sihir metafisik filsafat dan brutalitas material pengusuran kaum papa. Dengan bersahaja kedua teman itu bertanya: Dapatkah STF Driyarkara mengundang para akademisi duduk bersama sejenak untuk menyatakan sikap terhadap amuk pengusuran?

Permintaan itu mulia, meski tak ada yang istimewa. Bahkan mungkin terasa mubazir. Di negeri para preman, menegaskan sikap melalui pemikiran dan kata-kata bagaikan tindakan meludah ke udara—terasa seperti daya yang lolos dengan sia-sia. Namun, jauh di dalam ada suara lambat-lambat yang mengajak untuk tetap berharap. Hari berikutnya, satu dari dua dosen itu datang tergesa-gesa ke senior-nya, Franz Magnis-Suseno, lalu berkisah tentang keganasan pengusuran dan permintaan agar para akademisi mengambil sikap. Romo Magnis mendengar dengan geram, lalu bilang: "Saya akan menjadi pengundang". Beberapa hari kemudian, kata yang muncul dari per-

Dari seluruh uraian di atas tampak bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari karangan ini untuk mengemukakan pemecahan terhadap problem-problem moral yang ada, melainkan justru memaparkan dalam keterangan yang agak skematis betapa kompleksnya persoalan moral itu untuk bisa dipecahkan dan dijadikan pegangan dalam kehidupan bersama.

—ooOoo—

3

MANUNGGALING KAWULA-GUSTI DALAM TRANSISI

Potret Dunia Jawa dari Yogyakarta

G.Budi Subanar

Membahas tema kompleksitas dunia Jawa bukanlah sebuah perkara mudah. Pertama-tama, kalau mau memikirkan pokok bahasan yang menjadi objek kajiannya. Berbagai macam hal dapat dijadikan titik pijak untuk menghadirkan kompleksitas dunia Jawa tersebut. Di sisi lain, kalau memikirkan sebuah kerangka pandang, perlu ditemukan suatu sudut pandang tertentu yang dapat membantu untuk mengurai kompleksitas tersebut. Dua hal yang disebut ini berkaitan dengan objek kajian dan cara kerjanya. Untuk itu orang perlu melakukan sebuah pemilihan. Pokok apa yang akan dijadikan titik berangkat, dan kerangka pandang (kerja) macam apa yang akan digunakan untuk mengulasnya.

Lebih lanjut, kalau mau berangkat dari pokok atau peristiwa tertentu, hal ini pun dapat memunculkan permasalahan tersendiri. Katakanlah kalau mau menjadikan keraton yang selama ini dianggap sebagai pusat

budaya Jawa dengan para *priyagung*-nya (*trahing kusuma rumembesing madu*) sebagai titik berangkatnya. Belakangan ini terdapat sejumlah peristiwa di sekitar keraton yang melibatkan para *priyagung*-nya yang dapat memunculkan sebuah pesimisme untuk dapat menghadirkan kompleksitas yang merepresentasikan dunia Jawa tersebut.¹ Potret semacam ini semakin menambah keprihatinan yang telah dikemukakan oleh Niels Mulder dalam telaahnya terhadap dunia batin Indonesia yang mengkhhususkan dirinya dalam meneliti berbagai hal yang terjadi dalam dunia Jawa.²

Kalau titik berangkatnya akan bermula dari kehidupan sehari-hari orang kebanyakan (*pidak pendarahan*), kompleksitas dunia Jawa juga hadir di sana. Orang kebanyakan tersebut saat ini banyak dililit dengan berbagai problematika hidup yang mencekik leher. Mulai dari biaya hidup yang makin tinggi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, kenaikan biaya pendidikan yang tidak terjangkau, dan berbagai deretan problematika kehidupan yang membuat orang harus melakukan kiat agar tetap bisa makan untuk mempertahankan hidup dan menyekolahkan anak yang akan berguna untuk kelanjutan hidup masa depannya.

Dari mana akan memotret kompleksitas dunia Jawa? Ataukah akan mempertemukan keduanya? Dalam falsafah Jawa, *manunggaling kawula-gusti*, atau *jumbuhing kawula-gusti* merupakan satu kekhasan tertentu yang masih menjadi kredo, kepercayaan bagi banyak orang. Memang *manunggaling kawula-gusti* merupakan ungkapan yang berasal dan berlaku pada dunia mistik. Sekaligus, prinsip *manunggaling kawula-gusti* tersebut juga menjadi penghayatan hidup bagi sebagian masyarakat Jawa. Apakah justru bertolak dari kehidupan yang pluri wajah baik di kalangan para *priyagung* dan kaum kecil *pidak pendarahan* tersebut akan semakin ditemukan kompleksitas dunia Jawa yang senantiasa dihidupi?

¹ Perebutan untuk menguasai Keraton Kasunanan Solo, antara para pengikut Hangabehi dan pengikut Tejawulan sampai dengan tindakan fisik berupa pemukulan dan saling meludah. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana berbagai ajaran tentang kebijaksanaan hidup dan pengaturan diri dalam berperilaku sebagaimana ditinggalkan dalam khasanah dunia sastra mau pun yang menjadi bahan percakapan mereka, tidaklah memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang terjadi.

² Niels Mulder, *Ruang Batin. Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Menjabarkan tema yang dipilih sebagaimana tertera dalam judul di atas, paparan berikut akan mendasarkan pada sejumlah peristiwa historis dan satu dua di antaranya merupakan peristiwa aktual yang menarik untuk ditengahkan sekaligus merupakan cerminan kompleksitas dunia Jawa dewasa ini. Peristiwa tersebut mencakup kedua kutub—*priyagung* dan *pidak pendarahan*—yang dimaksud di atas. Hal inilah yang dijadikan titik berangkat untuk memperlihatkan sebuah potret kompleksitas dunia Jawa yang perlu dikaji ulang.

1. SUMBANGAN ROMO MAGNIS SUSENO DALAM KAJIAN DUNIA JAWA

Dalam pandangan Romo Magnis, dua puluh-tiga puluh tahun yang lalu, kompleksitas dunia Jawa tertata di dalam pandangan etikanya.³ Dalam usaha mempertanggungjawabkan secara metodologis atas pendekatannya terhadap etika Jawa, Romo Magnis mendasarkan pada metode fenomenologi di bidang kesadaran moral dari Max Scheler. Dengan metode tersebut orang dibawa masuk pada kesadaran akan adanya orientasi nilai-nilai yang mengarahkan, dan kesadaran akan kewajiban yang menuntun pada perwujudan kewajiban tersebut. Di samping itu, Romo Magnis juga menggunakan bantuan sosiologi dan antropologi yang memungkinkan pandangan etis tersebut didaratkan dalam suatu konteks hidup pada suatu lingkup budaya tertentu.

Untuk yang terakhir ini, Romo Magnis antara lain mengacu pada pandangan-pandangan Hildred Geertz, Koentjaraningrat, dan Niels Mulder. Mendasarkan pada bahan yang ada di kedua wilayah ilmu tersebut, Romo Magnis merumuskan bahwa pandangan etis orang Jawa mengacu pada dua nilai dasar, yakni: prinsip hormat dan hak. Sehubungan dengan prinsip hormat, Romo Magnis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli di bidang antropologi dan sosiologi sebagaimana disebut sebelumnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan prinsip hak, Romo Magnis mengambil konsep hak individu dari pemikiran barat yang kemudian didaratkan pada wilayah budaya Jawa sebagaimana ada pada penelitian ketiga tokoh di atas.

³ Etika yang dimaksudkan disini berkaitan dengan suatu keseluruhan pandangan-pandangan moral. Magnis Suseno, *Etika Jawa dalam Tantangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983).

Namun, kompleksitas dunia Jawa juga tercermin di dalam dunia pewayangan. Sejumlah tulisan Romo Magnis memperlihatkan hal tersebut. Analisis atas cerita Ramayana dan Mahabarata yang menjadi acuan lakon wayang, oleh Romo Magnis dikerangkai dengan analisis filosofis yang berkaitan dengan etika. Dalam analisisnya Romo Magnis menyebutkan bahwa epos Mahabarata memiliki permasalahan moral lebih kompleks daripada Ramayana yang masih melihat permasalahan moral dengan pemisahan hitam-putih.⁴ Epos Mahabarata tidak hanya menampilkan kisah yang secara moral dibedakan baik dan buruk, hitam putih begitu saja. Sedangkan dalam analisis atas Semar, Romo Magnis memperlihatkannya sebagai revitalisasi cita-cita priyayi tentang ksatria yang berbudaya, halus lahir batinnya. Semar memberi dimensi baru atas etika wayang sebab pada diri Semar diperlihatkan hal pokok yang bernilai pada diri manusia: bukan rupa fisik, bukan pembawaan lahir dan penguasaan tata karma, melainkan sikap batinlah yang utama.⁵

Setelah memberi sumbangan tersebut, Romo Magnis tidak banyak lagi membahas dunia Jawa. Sedangkan dari ketiga atau empat tokoh yang diacu oleh Romo Magnis, hanya Niels Mulder yang masih terus melanjutkan penelitiannya atas dunia Jawa. Setelah bukunya *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional* (1973) yang diacu oleh Romo Magnis, Niels Mulder masih menulis sejumlah buku lain sehubungan dengan dunia Jawa. Sejumlah bukunya yang masih terbit dapat disebut disini: *Pribadi dan Masyarakat di Jawa* (1985), *Ruang Batin Masyarakat Indonesia* (2001), dan *Mistisisme Jawa. Ideologi di Indonesia* (2001). Dalam arti tertentu tulisan Niels Mulder mencakup wilayah budaya Indonesia. Namun, Indonesia yang dimaksud didasarkan pada pengamatannya atas dunia Jawa. Lebih khusus lagi, sehubungan dengan dunia Jawa tersebut Niels Mulder mendasarkan pada pengalamannya di Yogyakarta. Dalam tulisan-tulisannya tersebut, Niels Mulder memperlihatkan dinamika budaya Jawa yang berhadapan dengan problematika yang kompleks.

⁴ Magnis Suseno, *Wayang dan Panggilan Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 16-17.

⁵ *Ibid.*, hlm. 37-39.

Pendekatan Niels Mulder didasarkan pada perspektif sosiologis, sedangkan bidang-bidang lain hanya disinggung saja. Bertolak dari catatan terakhir atas pengamatan Niels Mulder tersebut, sekaligus juga didasarkan pada pengalaman penulis yang tinggal di Yogyakarta, maka tulisan ini juga didasarkan pada hasil pengamatan dan pengalaman terlibat sebagai warga Yogyakarta. Tulisan berikut dimaksud untuk memperlihatkan sebuah potret kompleksitas dunia Jawa dari sisi lain yang biasa dibicarakan selama ini. Wilayah yang akan dikaji mencakup kegiatan di dunia ekonomi. Pilihan pada dunia ekonomi mempunyai cukup alasan karena pada wilayah tersebut terjadi pertarungan nyata agar orang dapat *survive* mempertahankan hidup. Pada wilayah ini keterlibatannya mencakup pada semua pihak: para priyayi dan anggota masyarakat lainnya. Pilihan ini juga didasari peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Ada beberapa peristiwa menarik terjadi di Yogyakarta yang melibatkan dua golongan masyarakat: para priyayi dan masyarakat kecil. Pada saat yang hampir bersamaan di lingkungan keraton Kasunanan Surakarta sedang berlangsung sebuah peristiwa perebutan kekuasaan, yang berarti juga perebutan atas aset-aset yang dimilikinya di antara para putra dan keluarga almarhum Pakubuwono XI.

2. PARA PRIYAYI

Penelitian tentang para *priyayi* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti baik asing maupun orang Indonesia. Dalam usaha untuk menambah sejumlah sisi baru terhadap pemahaman atas dunia *priyayi*, Sartono, dkk., memperlihatkan hasil sejumlah penelitian yang telah mendahuluinya.⁶ Palmier, van Niels, Geertz, dan lain-lain memperlihatkan bagaimana pandangan para priyayi dari para peneliti tersebut lebih didasarkan pada pemahaman bahwa para priyayi adalah mereka yang berada pada jajaran birokrasi kepegawaian. Dalam pandangan dasar yang sama tersebut ada sedikit perbedaan dari masing-masing peneliti. Dengan mendasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Soemartono Soemarsaid, Sartono dan kawan-kawan memberi catatan bahwa yang tergabung dalam jajaran para *priyayi* adalah kerabat raja (*priyayi* = para *yayi*, adik-adik raja beserta keluarga-

⁶ Sartono Kartodirdjo-A. Sudewo-Suhardjo Hatmosuprobo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 4-9

nya). Mereka inilah yang tergabung sebagai priyayi. Pada kalangan mereka sebagian kehidupannya menjadi tanggungan raja, bahkan keluarga mereka hidup dalam lingkungan wilayah pusat kerajaan atau istana, kabupaten tempat bangsawan tertinggi tersebut tinggal. Adapun kompleks tempat tinggal di mana para priyayi tersebut berdomisili mengambil bentuk bangunan yang mengacu pada kompleks bangunan keraton Yogyakarta dan Surakarta.⁷

Sejarah para priyayi pada satu sisi mengacu pada sistem kepegawaian dalam tata birokrasi. Pada sisi lain mengacu pada latar belakang keluarga, sebagai unsur yang diturunkan. Bahkan, dalam kepegawaian pun cara penurunan pun dilakukan dengan cara magang. Dengan mengacu pada kepriyayian yang didasarkan pada sistem kepegawaian, Sartono melihat sejak kedatangan Jepang yang menggantikan kolonialisme Belanda dan sejak masa pemerintahan RI, sejarah priyayi telah mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh masuknya para pegawai baru dalam jajaran birokrasi yang berasal dari lapisan masyarakat yang lain. Sebuah pertanyaan muncul bagaimana kelompok priyayi melakukan *survive* untuk dirinya?

Ong Hok Ham menyebut bahwa di satu pihak golongan priyayi memiliki asset rumah, tanah, dan sejumlah hal lain yang mobilitasnya rendah untuk modal perekonomian. Di sisi lain, para priyayi tersebut bergantung pada golongan pedagang ataupun pihak yang memiliki uang untuk membiayai aktivitas mereka yang berkaitan dengan kedudukan sosial politiknya. Para priyayi ini memiliki konsep bahwa kekayaan mereka bergantung pada anugerah raja atau penaklukan rakyat.⁸ Satu hal yang menarik sehubungan dengan kaitan antara dunia priyayi dan aktivitas ekonomi adalah yang dicatat oleh Francois Raillon. Dalam tulisan "Dapatkah Orang Jawa menjalankan Bisnis? Bangkitnya Kapitalis Pribumi di Indonesia", ia menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX merupakan seorang *priyayi* yang melakukan terobosan dalam dunia bisnis.⁹ Beliau menjadi pelopor bagi para kelompok priyayi yang

⁷ Sartono, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi*, hlm. 28

⁸ Ong Hok Ham, *Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 44.

⁹ Francois Raillon, "Dapatkah Orang Jawa menjalankan Bisnis? Bangkitnya Kapitalis Pribumi di Indonesia", dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth (eds.), *Kepemimpinan Jawa. Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 233.

mengembangkan bisnisnya tidak hanya mengandalkan pada warisan tanah yang dimilikinya. Bahkan, Sultan tercatat sebagai salah satu orang dari 100 orang terkaya di Indonesia. Bisnisnya mencakup sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan gula, perjalanan, perdagangan eceran, perbankan, tembakau, bangunan, udang dan tuna, film, dan sebagainya. Informasi di atas menjadi terasa sebagai sesuatu yang istimewa mengingat di dalam berbagai terbitan hampir tidak pernah Sultan Hamengku Buwono IX disebut sebagai pelaku bisnis. Kita lebih banyak menemukan tulisan-tulisan tentang Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pimpinan Keraton Yogyakarta sejak tahun 1940, Gubernur Kepala Daerah DIY, Wakil Presiden RI tahun 1973–1978, dan beberapa jabatan lain dalam masa perjuangan pemerintahan RI, serta sejumlah jabatan dalam organisasi kemasyarakatan seperti Pramuka.

3. SULTAN HAMENGKU BUWONO IX—CERMIN TRADISI JAWA YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Sejak awal masa penobatannya sebagai raja, Sultan Hamengku Buwono IX merumuskan sikap dasar pendiriannya dalam tanggung jawabnya sebagai pewaris takhta Kesultanan Yogyakarta. Beliau merumuskan diri dalam pidato penobatannya sebagai berikut, "*Kendati pendidikan Barat sangat mewarnai saya, saya pertama-tama seorang Jawa dan tinggal pertama seorang Jawa.*"¹⁰ Bahkan, dalam proses penandatanganan untuk pengangkatannya berkaitan dengan perjanjian dengan Belanda, ada sebuah peristiwa di mana Sultan Hamengku Buwono IX tidak memperhitungkan hal-hal yang memberatkan yang semula menjadi pertimbangannya. Tindakan menyetujui perjanjian tersebut dilakukannya mengingat adanya "bisikan" untuk melakukan penandatanganan itu

¹⁰ Rumusan Sultan Hamengku Buwono IX yang aslinya ditulis dalam bahasa Belanda tersebut tersimpan dalam sebuah prasasti yang ada di Keraton Yogyakarta. Frans Wijzen, "Terlebih dulu Jawa. Kontekstualisasi dan Perkembangan Gereja Indonesia", dalam *Orientasi Baru*, No. 10, (1997), hlm. 120

begitu saja.¹¹ Keyakinan tersebut terbukti dengan terusirnya Belanda dari wilayah jajahannya di Hindia Belanda sejak kedatangan Jepang.

Rumusan sebagai *seorang Jawa* sebagaimana diungkapkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dapat dipahami dalam banyak arti. Pertama, bisa dimaknai sebagaimana pada umumnya berlaku sebagai seorang penguasa kerajaan yang *berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta*.¹² Ataupun juga mengandung sebuah penghayatan hidup yang berorientasi pada etika Jawa yang menjunjung rasa hormat dan harmoni,¹³ yang terjelma dalam berbagai keutamaan dalam hidup sehari-hari antara lain sikap *sabar, legawa*, serta ikut *memayu hayuning buwana*.¹⁴ Pada satu sisi, berbagai rumusan tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami ungkapan "sebagai seorang Jawa". Namun demikian, di sisi lain, pengalaman sejumlah orang yang mengalami pergaulan bersama Sultan Hamengku Buwono IX memperlihatkan beliau sebagai seorang pribadi yang berbeda dari bayangan seorang penguasa tertinggi Keraton Yogyakarta dengan atribut aristokrasinya.¹⁵ Bahkan kemudian, Sartono Kartodirdjo yang pernah mengadakan penelitian tentang priyayi dalam perspektif sejarah,¹⁶ menulis tentang Sultan Hamengku Buwono IX sebagai tokoh yang tepat dalam menjawab tantangan pada zamannya.¹⁷

¹¹ Atmakusumah (ed.), *Tahta untuk Rakyat*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 44.

¹² *Ber budi bawa leksana* (Jw.) = mengutamakan kebaikan; *ambeg adil para marta* (Jw.) = berlaku adil kepada siapa pun. Lihat G. Mudjanto, *The Concept of Power in Javanese Culture*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986).

¹³ C. Geertz, *Tolerance and Harmony of the Javanese*; Romo Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 1984).

¹⁴ *Legawa* (Jw.) = dengan hati terbuka menerima kenyataan sebagaimana yang terjadi; *memayu hayuning buwana* (Jw.) = melestarikan keindahan dunia. De Jong, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1976).

¹⁵ Atmakusumah (ed.), *Takhta untuk Rakyat*.

¹⁶ Sartono dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi...*

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannya*, Ceramah dalam rangka Pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX, (Yogyakarta, 19 Desember 1995), hlm. 11.

Pribadi Sultan Hamengku Buwono IX sebagaimana terumus dalam pidato penobatannya di atas memperlihatkan dua wilayah tradisi yang bertemu. Di satu sisi adalah pendidikan Barat yang dialami Sultan Hamengku Buwono IX dengan segala nilai dan berbagai unsur lain yang diperolehnya;¹⁸ dan di sisi lain, seorang Jawa yang menjadi dasar genealogi dengan berbagai kandungan nilai kultural yang termuat di dalamnya. Keduanya merepresentasikan diri dalam diri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai seorang Sultan Jawa modern, yang menghadirkan diri sebagai seorang aristokrat yang merakyat dan demokratis, yang terbuka terhadap berbagai perubahan. Hal tersebut dihayati oleh Sultan Hamengku Buwono IX dalam kancah lokal di wilayah Yogyakarta, dalam lingkup nasional, bahkan juga dalam pergaulan internasional.

Dalam sebuah paparan sosiologis, Niels Mulder memperlihatkan bagaimana Yogyakarta sebagai satu pusat tradisi Jawa telah menjadi kancah pertemuan antara dua aliran tradisi budaya yang berbeda. Sekaligus diperlihatkan bagaimana pertemuan tersebut berlangsung di wilayah yang lebih luas lagi di Indonesia. Di satu sisi, tradisi Jawa dengan berbagai peninggalan yang mencakup berbagai unsur; dan di sisi lain lain, adalah unsur modern yang mencakup banyak hal, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Dalam dua pertemuan tersebut, baik di wilayah Yogyakarta maupun dalam lingkup nasional, diperlihatkan situasi yang memunculkan banyak permasalahan yang perlu dicermati. Secara khusus, hal ini menjadi sangat penting untuk Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya Jawa karena warga Yogyakarta, dalam berbagai lapisannya—baik dari segi usia maupun profesi—tidak lagi memperlihatkan sebuah kehidupan orang-orang Jawa yang memiliki sebuah akar tradisi yang kuat. Demikian pun pada lingkup nasional tengah berlangsung banyak perubahan yang terjadi.¹⁹

¹⁸ Mochtar Buchori memperlihatkan bagaimana sistem pendidikan akan membekali seseorang untuk memahami tentang makna kehidupan dengan cakupan yang meliputi makna wilayah simbolik, wilayah empiris, wilayah estetik, wilayah synoetics (pengetahuan tentang pribadi dan relasi interpersonal), wilayah etik dan wilayah sinoptik. Masing-masing pendidikan makna tersebut diberikan melalui berbagai mata pelajaran tertentu. Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 51-53.

¹⁹ Niels Mulder dalam bukunya *Ruang Batin Masyarakat Indonesia* membahas secara khusus sebuah bab yang diberi judul "Proses Kebudayaan di Yogyakarta". Dalam bagian tersebut

Bagi semua tradisi lokal di mana pun, pertemuan dengan modernitas telah menjadi sebuah keniscayaan. Dalam ranah ekonomi, Karl Polanyi memperlihatkan bagaimana pertemuan tersebut disebutnya sebagai sebuah pertemuan yang menghasilkan dua gelombang (*double movement*): perluasan ekonomi global dan perlawanannya dari lingkungan hidup setempat.²⁰ Satu hal menarik berkaitan dengan Sultan Hamengku Buwono IX sehubungan dengan pertemuan ini termuat dalam tulisan Francois Raillon. Ia menyebutkan bagaimana Sultan Hamengku Buwono merupakan seorang *priyayi* Jawa yang melakukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam dunia ekonomi. Kalau ternyata di balik semua jabatan yang dikenal publik tersebut ternyata Sultan Hamengku Buwono juga merupakan pelaku bisnis, gambarannya sebagai pelaku bisnis tersebut juga perlu ditempatkan kembali pada pernyataan Sultan sebagai "seorang Jawa yang memperoleh pendidikan Barat". Dari sinilah kemampuan kepemimpinannya juga di dalam bidang bisnis tersebut memperoleh pendasarannya yang kukuh dan teruji.

Dalam buku terbaru tentang Keraton Yogyakarta berjudul *Keraton Jogja The History and Cultural Heritage* (2002) disebutkan beberapa usaha ekonomi yang mulai dirintis sejak zaman Sultan Hamengku Buwono IX meliputi bidang tembakau dan pendirian pabrik gula Madukismo.²¹ Di samping itu, dikemukakan pula sejumlah kebijakan Sultan Hamengku Buwono IX dalam mengarungi sejarah keterlibatannya pada awal pembentukan Republik Indonesia.

Sebagai seorang pemimpin kerabat keraton, Sultan menghidupi keluarga besarnya dengan menggunakan sejumlah warisan termasuk yang berupa tanah dari mendiang ayahnya Sultan Hamengku Buwono VIII. Tahun-tahun pertama masa kepemimpinannya, Sultan Hamengku Buwono IX dihadapkan pada situasi sulit karena adanya perubahan pihak yang menjajah Indonesia

digambarkan bagaimana pertemuan antara dua tradisi yakni Tradisi Jawa di satu pihak dan tradisi modern di pihak lain, telah menghasilkan situasi sebagaimana digambarkan dalam bab tersebut. Niels Mulder, *Ruang Batin*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 37-73.

²⁰ Karl Polanyi, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, (Boston: Beacon Press, 1957), hlm. 76.

²¹ Chamamah Soeratio, dkk., (eds.), *Keraton Jogja The History and Cultural Heritage*, (Yogyakarta: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Indonesia Marketing Association, 2002), hlm. 106-107.

waktu itu. Tahun 1942, Jepang mengambil alih tampuk penguasaan atas Hindia Belanda. Dalam masa itu sekaligus Jepang berhadapan dengan Perang Asia Pasifik. Karenanya kebijakan ekonomi Jepang diarahkan pada perekonomian yang mendukung Perang Asia Pasifik.²² Kebijakan tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan antara lain mobilisasi massa untuk kerja rodi di garis depan medan perang. Sedangkan dalam bidang pertanian, Jepang memberlakukan kebijakan dengan penanaman komoditas pertanian yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam periode perang tersebut.

Salah satu kebijakan Sultan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kerja paksa, dan sekaligus juga untuk menopang sistem perekonomian di wilayahnya, Sultan Hamengku Buwono IX memberlakukan kebijakan pembangunan saluran air *Selokan Mataram*. Dengan kebijakannya tersebut, Sultan berhasil melepaskan rakyatnya dari kewajiban untuk melakukan kerja rodi di berbagai wilayah yang jauh dari Yogyakarta untuk membantu bala tentara Jepang dalam melakukan Perang Asia Pasifik.

Beranjak dari situasi gawat di bawah Jepang, Republik Indonesia ternyata justru dapat memperoleh kemerdekaannya. Namun, belum lagi satu tahun usia RI, pusat pemerintahan beserta seluruh pimpinan pemerintahan terpaksa hijrah ke pedalaman Yogyakarta yang memiliki sejumlah faktor pendukung sehingga memungkinkan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Situasi demikian menuntut Sultan yang menjadi pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk turut banyak terlibat mempertahankan eksistensi pemerintahan beserta seluruh rakyat Indonesia yang mendiami wilayah tersebut. Berkaitan dengan hal ini, dalam bidang perekonomian Yogyakarta telah memungkinkan bagi beredarnya mata uang ORI (Oeang Repoebliek Indonesia) yang berlaku untuk wilayah Republik Indonesia. Di samping itu, Sultan sendiri mengeluarkan sejumlah kekayaan yang dimilikinya untuk menopang kelangsungan hidup pemerintahan RI. Hal ini ditempuh dengan memberikan gaji kepada pejabat negara.²³

²² S. Sato, *War, Nationalism, and Peasants Java under the Japanese Occupation 1942-1945*, (Armenk-London: Southeast Asia Publication Series, 1994).

²³ Satu hal menarik dari masa ini adalah kenyataan bahwa sampai sekarang keluarga M. Hatta masih menyimpan mata uang yang diberikan dari kekayaan Sultan Hamengku Buwono IX

Setelah kemerdekaan RI, sejumlah kebijakan Sultan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang di satu sisi untuk menghidupi kerabat keluarga besarnya dan turut serta menopang perekonomian rakyat, sekaligus memberi andil dalam pemasukan devisa bagi negara. Hal tersebut antara lain sebagaimana dilakukannya dalam pendirian Pabrik Gula Madukismo dan Pembangunan Hotel Ambarukma yang menggunakan modal dan tanah yang dimiliki oleh keraton.

Pembangunan Pabrik Gula Madukismo sudah dimulai tahun 1955. Dalam skala politik ekonomi lokal, pembangunan tersebut dapat ditempatkan sebagai usaha untuk menanggapi situasi Yogyakarta yang mengalami kemiskinan karena proses *brain-drain* setelah pada tahun 1950 Ibukota RI kembali ke Jakarta.²⁴ Pada skala nasional, pada masa tersebut tengah berlangsung usaha pemerintah untuk membantu tumbuhnya pengusaha dan pemilik modal pribumi.²⁵

Pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa kontraktor Machine Fabrik Sangerhausen dari Jerman Timur. Peresmian Pabrik Gula Madukismo tersebut dilakukan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Mei 1958. Dalam hal kepemilikan, pada saat pendiriannya Sultan menguasai 75% modal, dan 25% saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia.²⁶ Dalam status kepengurusan Pabrik Gula Madukismo, Sultan Hamengkubuwono IX menduduki jabatan sebagai presiden komisaris. Adapun penguasaan lahan penanaman tebu, sampai tahun 1975 Pabrik Gula Madukismo memiliki 4.000 ha. Penyediaan lahan untuk penanaman tebu tersebut kiranya tidak dapat dilepaskan dari sistem pengairan yang telah dirintis pada tahun 1940-an tatkala

sebagai gaji yang pernah diterimanya sebagai Wakil Presiden RI. Atmakusumah, *Tahta untuk ...*, hlm. 206–213.

²⁴ Heidi Dahles, *Tourism, Heritage and National Culture in Java. Dilemmas of a Local Community*, (Richmond: Curzon, 2001), hlm. 62.

²⁵ Richard Robinson, "Kesenjangan Antara Modal Golongan Ekonomi Kuat dan Lemah di Indonesia", dalam *Prisma*, No. 5 (1985), hlm. 79–85.

²⁶ Dalam perkembangan selanjutnya, sebagaimana tertulis di dalam laporan tahun 1999, pembagian kepemilikan modal menjadi 65% milik Sultan dan 35% milik pemerintah. Lih. "Laporan Direksi Pabrik Gula Madukismo Tahun 1999 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul."

Sultan Hamengku Buwono IX mencanangkan pembangunan *Selokan Mataram* yang menyediakan sistem pengairan di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul, bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 1978, penguasaan lahan tanah berkembang menjadi lebih dari 5.000 ha. Bahkan, pada tahun-tahun 1980–1983 mencapai 7.000 ha. Sedangkan dalam sepuluh tahun terakhir penguasaannya berkisar 6.000 ha. Mulai tahun 1984, Pabrik Gula Madukismo mengadakan kontrak pengelolaan manajemen dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia salah satu BUMN di bawah Departemen Keuangan.

Usaha bisnis selanjutnya adalah pendirian Hotel Ambarukma. Pembangunan Hotel Ambarukma yang menggunakan tanah milik keraton dimulai tahun 1961. Pembangunan Hotel Ambarukma perlu ditempatkan juga dengan pembukaan Sendratari Ramayana di halaman Candi Prambanan pada masa yang hampir bersamaan. Pada tanggal 25 Agustus 1961 Presiden Sukarno mengadakan peninjauan terhadap rencana pembangunan Hotel Ambarukma sebelum meresmikan pembukaan Sendratari Ramayana di halaman Candi Prambanan.²⁷ Dengan demikian, pembangunan Hotel Ambarukma tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa sebuah konteks yang luas yakni pengelolaan Sendratari Ramayana di halaman Candi Prambanan. Pembangunan Hotel Ambarukma merupakan usaha untuk memberi tempat dan fasilitas kepada arus para wisatawan yang datang. Kendati demikian, keberadaan Hotel Ambarukma tidak melulu memberi kontribusi perekonomian dari bidang turisme. Dengan menghubungkannya pada penyelenggaraan Sendratari Ramayana menjadi jelas bahwa kebijakan di bidang ekonomi atas pendirian Hotel Ambarukma tidak dapat dilepaskan dari perspektif budaya. Dampak dalam bidang budaya menjadi terasa kalau mencermati perkembangan yang terjadi sebagai pengaruh pembukaan panggung Sendratari Ramayana.²⁸

²⁷ *Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961*, (Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, tanpa tahun), hlm. 115–121.

²⁸ Dari Panggung Ramayana, terlahir sejumlah tokoh berkaliber nasional maupun internasional baik di bidang tari maupun karawitan. Seniman tari yang masih aktif seperti Retno Maruti dan Sardono W. Kusuma sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan mereka di panggung pentas Sendratari Ramayana. Demikian pun Empu Karawitan Ki Tjokrowasito turut menciptakan hampir separoh dari gendhing-gendhing yang dimainkan dalam

Dari dua kasus keterlibatan dalam wilayah ekonomi di atas, paling tidak tercermin bagaimana pertemuan dua wilayah dunia tradisi petani dan tradisi budaya Jawa yang diakomodir serta dimasukkan dalam perhitungan untuk melakukan usaha dalam dunia ekonomi modern. Dalam situasi ini ketegangan memang berlangsung dan sekaligus dilibati. Bagaimana Sultan menempatkan diri dan turut bermain dalam kancah pertemuan tersebut, dan di mana kejawaannya memperlihatkan diri? Di sinilah menjadi nyata bagaimana dalam diri Sultan Hamengku Buwono IX terjelma pengalaman orang Jawa yang tidak kehilangan kejawaannya, betapapun tinggi derajat sosial seseorang ataupun tingkat pendidikannya.

4. IMAGO MUNDI

Dalam sebuah pemaknaan atas kompleks bangunan Keraton Yogyakarta, dengan mengacu pada pandangan T.E. Behrend, Denys Lombard memperlihatkan kompleks tersebut sebagai *imago mundi* (citra dunia).²⁹ Pemaknaan atas citra dunia tersebut ditampakkan pada tata susun kompleks keraton yang membujur utara-selatan dengan sejumlah bangunan yang ada di kompleks tersebut: alun-alun utara, alun-alun selatan, Siti Hinggil, Kemandungan, Sri Manganti, dan sejumlah bangunan lain. Bangunan-bangunan yang memiliki fungsinya masing-masing tersebut memiliki sebuah tata susun konsentris di mana Prabasuyasa merupakan titik pusat konsentrisnya dan kedua alun-alun sebagai wilayah yang ada pada lapis paling luar dari lingkaran konsentris tersebut. Dari kedua alun-alun tersebut, diperpanjang lagi mengarah ke utara melewati Tugu

Sendratari Ramayana. Karya-karya Ki Tjokrowasito tersebut menjadi tempat peleburan bagi dua corak budaya Jawa gaya Yogyakarta dan Surakarta yang dalam mitosnya seakan masing-masing telah menjadi entitas budaya tersendiri yang tidak dapat saling dipertemukan. Tercatat pula sebuah pengakuan kekaguman atas Sendratari Ramayana dari seorang artis legendaris Charlie Chaplin. Lih. *Laporan Seminar Sendratari Ramayana Nasional Tahun 1970*, (Panitia Penyelenggara Seminar Sendratari Ramayana Nasional 1970); Tim Pengkajian Maskarja, *Elo, Elo! Lha Endi Buktine? Seabad Kelahiran Empu Karawitan Ki Tjokrowasito*, (Yogyakarta: Masyarakat Karawitan Jawa, 2004).

²⁹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 3, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 113.

akan terarah ke Gunung Merapi. Sedangkan dari alun-alun selatan melewati Panggung Krapyak akan terarah ke Samudera Indonesia.

Bagian-bagian bangunan dalam kompleks keraton tersebut didirikan secara bertahap sampai akhirnya mencapai kelengkapannya sebagaimana adanya yang kemudian disatukan sebagai sebuah kompleks yang membentuk kesatuan yang konsentris. Peter Carey mencatat angka-angka tahun yang berlainan saat bangunan-bangunan tersebut didirikan.³⁰

Sebelum dibangun menjadi bangunan permanen dengan menggunakan batu bata dan semen, kompleks keraton telah menjadi objek pemandangan tersendiri bagi sejumlah seniman Belanda. Paling tidak tercatat dua seniman A. de Nelly³¹ dan Johannes Rach³² yang menggambar kompleks bangunan keraton ketika masih merupakan bangunan dari kayu yang dikelilingi pagar kayu pada bagian luarnya. Bangunan-bangunan yang dikelilingi hamparan tanah luas tersebut memiliki sebuah kekhususan sebagaimana tampak antara lain pada bangunan Siti Hinggil tempat sultan bertakhta yang di depannya terdapat 2 (dua) pohon beringin yang saling bersebelahan di tengah halaman luas tersebut.³³

Sampai sekarang, kompleks keraton tersebut tetap mempertahankan diri dengan konsep *imago mundi*-nya³⁴ yang dilengkapi dengan berbagai macam benda pusaka yang dimiliki, berbagai upacara dan beragam tradisi yang masih

³⁰ P.B.R. Carey, *The Archive of Yogyakarta*, Vol. I, (Oxford: Oxford University Press, 1980), hlm. 6-7. Buku *Kota Jogjakarta 200 Tahun* juga menyebutkan sejumlah bangunan di dalam kompleks Keraton Yogyakarta tanpa menyebut angka-angka tahun pendirian.

³¹ P.B.R. Carey, *Archive of Yogyakarta*, hlm. ii.

³² Johannes Rach 1720-1783 *Artist in Indonesia and Asia*, (Amsterdam: The Rijkmuseum Amsterdam, The National Library of Indonesia, 2001), hlm. 96-97.

³³ Kedua pohon beringin tersebut dikenal sebagai Dewa Daru dan Jaya Daru. Kedua pohon tersebut membantu Sultan untuk mengarahkan pandangan ke arah Tugu di mana bersemayam Kyai Jaga, seekor naga yang dikisahkan telah memberi petunjuk awal untuk pemilihan tempat pendirian pusat Keraton Kesultanan Yogyakarta di wilayah hutan Beringan. *Kota Jogjakarta 200 tahun*, (Yogyakarta, tanpa tahun dan penerbit), hlm. 19.

³⁴ Hal tersebut tampak pada cover buku *Keraton Yogya The History and Cultural Heritage* bagian belakang yang memperlihatkan poros Keraton, Tugu dan Gunung Merapi pada arah Utara, dan Keraton, Panggung Krapyak dan Lautan Indonesia pada arah Selatan.

dihidupi sebagai warisan tradisi peninggalan sejarah dan budaya yang masih dipertahankan. Buku *Keraton Yogya The History and Cultural Heritage* (2002) mendokumentasikan hal-hal tersebut.

Di sisi lain, keterbukaan Yogyakarta terhadap dunia ekonomi internasional sebagaimana antara lain ditandai dengan pembangunan Hotel Ambarukma untuk menampung para turis yang berkunjung telah mengubah wajah Yogyakarta. Sejumlah hasil penelitian memperlihatkan bagaimana dampak turisme tersebut telah mengubah kehidupan yang ada di Yogyakarta.³⁵ Perubahan tersebut antara lain mencakup pada mata pencaharian penduduk Yogyakarta yang menggantungkan pada sektor pelayanan di bidang pariwisata. Selain itu, perubahan juga berkaitan dengan gaya hidup. Bukan hanya pengaruh dari dunia pariwisata yang telah mengubah wajah Yogyakarta. Dalam bukunya, Niels Mulder menyebutkan bagaimana berbagai kebijakan rezim Orde Baru sangat mempengaruhi wajah kehidupan Yogyakarta. Niels Mulder menyebutnya sebagai pengaruh sekularisasi, dan antara lain menghasilkan gaya hidup neopriyayi. Selain itu, perubahan wajah kehidupan Yogyakarta juga tampak dalam berbagai bidang yang lain.³⁶

5. PERGESERAN PEMILIKAN TANAH: BERALIHNIA POLA HIDUP

Dalam simbolisme keraton sebagai *imago mundi* terdapat sebuah prinsip hidup yang ditemukan di kalangan orang Jawa yakni berorientasi pada tempat. Orientasi tempat ini menjadi salah satu pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Pada bangunan rumah dengan simbolismenya di kalangan masyarakat luas juga ditemukan betapa orientasi tempat menjadi salah satu kekhasan orang Jawa. Dalam rumah Jawa, *senthong tengah* yang ada di ruang keluarga akan

³⁵ Tarhadi (ed.), *Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993-1994, (Yogyakarta, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993); Heide Dahles, *Tourism, Heritage, and National ...*, hlm. 53-130.

³⁶ Dr. Irwan Abdullah dan Prof. Dr. Sjafri Sairin, "Viewing Yogyakarta through Billboard Media", Prof. Dr. I Made Bandem, "Yogyakarta Art Festival: A Medium and Strategy for Cultural Development", dalam *Urban Cultural Research*, Vol. 1, (2003), hlm. 103-116; 51-61.

menjadi pusatnya. Sedangkan, kalau memperhatikan salah satu basa-basi orang Jawa dalam percakapan, satu formulasi yang biasa kita temui sebagai ungkapan sapaan awal dalam bertegur sapa adalah rumusan, "*Badhe tindak pundi?*" (Akan pergi kemana?) Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin juga merupakan sebuah ungkapan klise, "*Badhe dhateng mriku.*" (Akan ke situ). Di balik ungkapan tersebut tercermin salah satu orientasi pola berpikir orang Jawa. Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa orang Jawa mempunyai orientasi tempat.³⁷

Operasionalnya pola pikir yang berorientasi tempat juga berpengaruh pada cara menunjuk arah yang tidak mengarah ke kanan atau ke kiri. Terlepas dari arah klibat untuk sembahyang bagi kalangan Muslim, orang Jawa (dari daerah Yogyakarta) akan mencari di mana *lor* (utara), di mana *kidul* (selatan).³⁸ Orientasi arah bukannya didasarkan pada arah yang secara objektif jelas untuk ditunjuk yakni kanan atau kiri.

Kehidupan yang ditentukan dengan berorientasi pada tempat tersebut juga tampak pada *unggah-ungguh* (tata krama) bahasa Jawa yang mensyaratkan orang tahu di mana tata tempat seseorang berada dalam relasi sosialnya. Dengan memahami tata tempat dalam relasi sosial tersebut, hal ini akan menentukan seseorang kepada siapa ia akan berbahasa *krama* atau *ngoko*. Bagaimana halnya pola berpikir yang mengacu pada tempat ini terus berlangsung ketika kehidupan seseorang mengalami pergeseran?

Dalam kalangan masyarakat pedesaan, saat ini sering muncul ungkapan, "*Wah Si Slumun anake pak Slamet, saiki numpak galengan.*"³⁹ Ungkapan tersebut mau menunjuk bahwa Si Slumun anaknya pak Slamet, saat ini mempunyai sepeda motor sebagai sarana transportasinya. Sepeda motor tersebut menjadi sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kelancarannya pergi dan pulang ke sekolah, tempat di mana seseorang menuntut ilmu. Sore

³⁷ Revianto Budi Santosa, *Omah, Membaca Makna Rumah Jawa*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), hlm. 1-3.

³⁸ Di daerah Yogyakarta, anak-anak saat bermain dengan seekor kepompong ulat akan mendengarkan lagu berikut: *Enthung-enthung, endi lor, endi kidul, ger-ger mencoka pager* (Kepompong, di manakah arah utara, dan selatan. Bertenggerlah di pagar.)

³⁹ *Galengan* (Jw.) = pematang sawah

harinya sepeda motor tersebut digunakan untuk hilir-mudik, *nglencer* dan *mejeng*, menunjang pergaulan sosialnya. Akhirnya, setelah lulus sekolah, sepeda motor tersebut bisa menjadi sarana untuk mencari makan dengan cara menjadi tukang ojek karena ternyata ijazah sekolah yang didapatnya tidak bisa digunakan untuk mencari pekerjaan di instansi pemerintah atau pekerjaan kantor lainnya. Dengan ungkapan *numpak galengan* dimaksud untuk menunjuk bahwa sepeda motor yang dimiliki Si Slumun tersebut diperoleh dengan cara menjual sebagian tanah sawah atau ladang orang tuanya. Itulah riwayat yang sering terjadi di kalangan anak muda di daerah pedesaan.

Ungkapan *numpak galengan* tersebut bisa dikaitkan dengan sebuah ungkapan lain yang ada kaitannya dengan pemilikan sawah tetapi berada dalam situasi kebalikannya. Ungkapan mirip yang dimaksud adalah *sabuk galengan*. Seseorang dikatakan mempunyai *sabuk galengan* karena orang tersebut (laki-laki) mendapat jodoh dan menikah dengan perempuan kaya yang memiliki warisan sawah dan ladang yang cukup luas.

Ungkapan *sabuk galengan* merupakan sebuah ungkapan yang hidup ketika masyarakat masih berorientasi pada masyarakat agraris yang mengandalkan pemilikan sawah dan ladang sebagai lahan kerja untuk menopang hidup. Sedangkan ungkapan *numpak galengan* muncul ketika orientasi hidup masyarakat pedesaan telah dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif sehingga tawaran barang-barang berteknologi tinggi ditanggapi dengan sikap antusias untuk bisa memilikinya. Bahkan juga ketika untuk bisa memiliki barang tersebut seseorang terpaksa harus mengorbankan sebagian tanah yang dimilikinya.⁴⁰

Kalau pada kalangan kaum muda, mengorbankan tanah pertanian dilakukan secara sadar untuk memenuhi gaya hidup, pada sekelompok lain mengorbankan tanah pertanian merupakan sebuah keterpaksaan sehingga memunculkan sebuah mekanisme resistensi. Dalam sebuah penelitian antro-

⁴⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, penulis pernah menemui kasus ketika beberapa tahun lalu melakukan kerja praktek di sebuah Rumah Sakit Jiwa di Yogyakarta. Seorang pemuda desa, oleh keluarganya dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa tersebut karena sehari-hari mengisolir diri tinggal di pucuk pohon kelapa. Ia mengalami guncangan kejiwaan karena orang tuanya tidak berhasil memenuhi permintaannya untuk membelikan sebuah sepeda motor.

pologis, Imam Setyobudi memperlihatkan bagaimana sekelompok petani di sebuah daerah pinggiran kota Yogyakarta melakukan sebuah tindakan yang dalam pola relasinya akan menjauhkan diri dari pusat. Kendati pusat kota tidak jauh dari tempat tinggal mereka, namun rasa keterhubungan dan manfaatnya jauh dari harapan dan dinamika hidup orang-orang tersebut. Mereka menjauh dari pusat, dan hal tersebut dilakukannya karena pusat Yogyakarta tidak lagi melindunginya, tidak memberi ketenteraman, dan telah membuatnya terasing.⁴¹

6. PEMIHAKAN YANG BERGESER KE PASAR?

Pada tanggal 7 Maret 1989 Sultan Hamengku Buwono X, pewaris takhta Kesultanan Yogyakarta dinobatkan untuk menggantikan mendiang ayahnya Sultan Hamengku Buwono IX. Saat tersebut seakan merupakan momentum penegasan tekad: Takhta bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat.⁴² Dalam prinsip kepemimpinannya, Sultan Hamengku Buwono X berpedoman pada arah untuk meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh mendiang ayahnya. Secara spesifik usaha tersebut ditempatkan pada usaha untuk mengukuhkan budaya (dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?).

Kedudukan Sultan Hamengku Buwono X sebagai penerus takhta pemegang pucuk pimpinan Keraton Kesultanan Yogyakarta, sekaligus sebagai pemimpin wilayah administratif pemerintahan kiranya tidak dapat diandaikan begitu saja. Hal tersebut antara lain dibuktikan dengan adanya beberapa jajak pendapat dalam beberapa kalangan masyarakat sebelum Sultan Hamengku Buwono X terpilih sebagai Gubernur DIY.⁴³ Dalam sisi yuridis, beberapa tahun terakhir ini berlangsung lagi diskusi tentang Rencana Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴¹ Imam Setyobudi, *Menari di Antara Sawah dan Kota. Ambiguitas Diri, Petani-petani terakhir di Yogyakarta*, (Magelang: Indonesiatara, 2001).

⁴² Rumusan tekad tersebut mendapat bentuknya yang semakin jelas pada peringatan sewindu penobatan Sultan Hamengku Buwono X. A. Ariobimo Nusantara (ed.), *Meneguhkan Tahta untuk Rakyat* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 32, 92.

⁴³ *Ibid.* hlm. 59-62

Sebelum itu, sudah sejak mudanya, Sultan Hamengku Buwono X terlibat dalam dunia bisnis. Beberapa jabatan yang pernah dipangku dalam dunia bisnis antara lain: Direktur PT Punokawan (jasa konstruksi), Presiden Komisaris Pabrik Gula Madukismo, Presiden Komisaris Bank Dagang Negara Indonesia (telah dilikuidasi), Ketua Kandinda DIY. Kendati demikian, beliau kurang tertarik pada dunia bisnis, dan lebih berminat pada dunia politik.⁴⁴

Dalam masyarakat Indonesia, kedua wilayah ekonomi dan politik tersebut sering dicampuradukkan. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik tidak jarang menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk terjun dalam kancah bisnis. Para pebisnis pun tidak jarang menempel pada wilayah politik untuk memperoleh kemudahan ataupun untuk mendapatkan tender bagi usahanya. Dengan demikian, diperlukan cakrawala pengetahuan yang luas, kejelian, serta kehati-hatian seorang pemegang kuasa untuk memainkan peranannya dalam mengemban tugas memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah permasalahan sering muncul. Dan dalam hal wilayah inilah beberapa peristiwa yang terjadi di Yogyakarta belakangan ini akan dijadikan sorotan.

a. Kebijakan Pengembangan Ambarukma

Setelah perjalanan waktu sekian puluh tahun, Hotel Ambarukma diserahkan kepada pihak Kasultanan Yogyakarta. Dalam keleluasaan untuk mengelola Hotel Ambarukma, pada awal tahun 2004, Sultan Hamengku Buwono X melontarkan rencana pembangunan sebuah pusat perbelanjaan di kompleks Hotel Ambarukma. Pusat perbelanjaan yang dibangun tersebut dimaksudkan untuk melayani orang-orang yang akan berbelanja. Mereka yang dilayani datang dari berbagai wilayah yang terbentang dari Cilacap sampai Pacitan (*Kompas-Yogyakarta*, 1/3/2004). Perlu diketahui bahwa acuan wilayah pelayanan yang disebut Sultan Hamengku Buwono X tersebut mengacu pada pemahaman wilayah *mancanegara* yang dikuasai Kerajaan Mataram Yogyakarta. Dengan cara demikian, terasa adanya pertimbangan yang mengacu pada sejarah masa lampau. Acuan sejarah tersebut terasa tumpang tindih dengan sebuah realitas

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 16

politik aktual yang diembannya dalam jabatan sebagai Gubernur DIY. Wilayah Cilacap dan Pacitan yang diacu sebagai bagian yang akan dilayani oleh pusat perbelanjaan yang akan dibangun tersebut merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah hal tersebut tidak menimbulkan sebuah permasalahan? Ataukah dalam sebuah kebijakan ekonomi prediksi semacam ini menjadi perlu untuk memperhitungkan keluasan pangsa pasar? Ataukah acuan wilayah tersebut lebih mau ditampilkan sebagai *imagined-community* sebagaimana dikemukakan Ben Anderson? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi sebuah diskusi tersendiri.

Proses realisasi atas perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan tersebut telah menimbulkan gejolak tertentu. Beberapa gejolak yang muncul disebabkan antara lain terjadinya penggusuran sebuah Sekolah Dasar yang ada di sekitar kompleks Hotel Ambarukma. Gejolak lain disebabkan adanya perusakan situs bangunan lama yang merupakan peninggalan milik keraton.

Selang beberapa waktu setelah dimulainya pembangunan pusat perbelanjaan tersebut, dalam kunjungannya meninjau pembangunan, Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan sebuah pandangan berkaitan dengan *hypermarket* untuk mengukuhkan pertimbangan rasional atas pembangunan itu. Dinyatakan oleh Sultan bahwa bukannya *hypermarket* yang berpotensi mematikan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), melainkan justru minimarket yang lokasinya berdekatan dengan Usaha Kecil dan Menengah tersebut. Oleh karena itu, keberadaan minimarket tersebut perlu dibatasi jumlahnya (*Kompas-Yogyakarta*, 9/9/2005).

Sehubungan dengan ungkapan Sultan tersebut, sejumlah kalangan memberikan reaksinya. Budi Wahyuni seorang aktivis gerakan perempuan menyatakan *hypermarket* dan mall tetap merugikan Usaha Kecil dan Menengah karena kendati berkedok grosir toh dalam prakteknya tetap melakukan penjualan eceran. Selain itu, mall dinilai tidak mampu menampung produk hasil Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, *hypermarket* dan mall berpotensi mematikan Usaha Kecil dan Menengah (*Kompas-Yogyakarta*, 10/9/2005). Pendapat lain dikemukakan oleh Lucinda, seorang dosen dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang mengungkapkan perlunya melindungi pasar tradisional melalui penciptaan zona jarak antarpasar serta peraturan-peraturan yang lain (*Kompas-Yogyakarta*, 26/9/2005). Dalam sebuah forum

yang terpisah dari diskusi tersebut Yu Beruk, seorang seniwati tradisional Yogyakarta, dalam sebuah pertunjukan monolog *Pasar Ilang* menyuarakan keprihatinan tersingkirnya pasar-pasar tradisional akibat berbagai kebijakan pejabat pemerintah setempat (*Kompas-Yogyakarta*, 11/6/2005).

Menarik untuk diperhatikan bahwa reaksi-reaksi yang berkaitan dengan kebijakan Sultan Hamengku Buwono X muncul dari kalangan perempuan. Hal tersebut seakan sejalan dengan apa yang ditulis oleh Suzanne April Brenner. Dalam bukunya *The Domestication of Desire. Women, Wealth and Modernity in Java*,⁴⁵ Suzanne April Brenner memperlihatkan hasil penelitiannya di antara pekerja dan pengusaha batik di Surakarta. Kota tersebut telah berorientasi pada pembangunan di Jakarta, dengan berbagai perubahan yang antara lain ditandai dengan bermunculannya berbagai pemukiman baru dan terjadinya peminggiran pasar-pasar tradisional yang digantikan oleh pusat-pusat perbelanjaan modern. Perubahan-perubahan tersebut seakan tidak menyentuh lingkungan usaha batik. Pada lingkungan itu, kaum perempuan menjadi pelaku ekonomi yang gigih dengan aneka kiat dalam memperjuangkan kehidupannya. Bahkan, perjuangan kaum perempuan lebih gigih dibandingkan kaum pria, kendati kebebasan mereka banyak dibatasi oleh berbagai pihak negara, masyarakat, juga oleh kekuatan kapitalisme.

Semula Hotel Ambarukma dibangun sebagai sebuah sistem pendukung untuk pengembangan ekonomi yang memperhitungkan aspek budaya lokal serta memberi kesempatan pada orang-orang setempat untuk turut berperan serta di dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung. Dengan adanya pengembangan pembangunan pusat perbelanjaan tersebut, kompleks Hotel Ambarukma kini mempunyai fungsi untuk berdiri pada garis depan ajang kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan konsumsi masyarakat. Bahkan, cakupan wilayah pelayanannya dibayangkan menjangkau wilayah seluas *mancanegara* dari Kesultanan Yogyakarta pada zaman perjanjian Gianti. Sementara kenyataannya, rencana tersebut telah mengabaikan bahkan mengorbankan anggota masyarakat yang ada di seputar pusat perbelanjaan tersebut.

⁴⁵ Suzanne April Brenner, *The Domestication of Desire. Women, Wealth, and Modernity in Java*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998).

b. Alun-alun Ditawarkan sebagai Lahan Parkir

Pada pertengahan tahun 2005, Sultan Hamengku Buwono X mengajukan sebuah gagasan yang juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Usulannya berupa rencana yang menawarkan alun-alun sebagai area untuk membangun lokasi parkir di bawah tanah (*Kompas-Yogyakarta*, 19/5/2005). Lontaran wacana tersebut semula masih merupakan sebuah gagasan awal. Kendati demikian, tidak dapat dilihat sebagai sebuah wacana yang muncul begitu saja. Dikaitkan dengan paparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ini bukan pertama kali Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan tempat peninggalan para leluhurnya untuk menjadi wilayah kegiatan bisnis, atau sarana penunjangnya. Bahkan, kalau mencermati wacana yang dilontarkan tersebut, tersirat sikap Sultan yang bersikap pro atas wacananya. Usulan pembangunan tempat parkir di bawah tanah bertolak dari praktek penggunaan alun-alun sebagai tempat parkir sehingga menimbulkan kekumuhan (*Kompas*, 9/12/2005). Bahkan, Sultan berpendapat bahwa proses pembangunan atas tempat parkir tersebut tidak akan mengancam bangunan yang ada karena penggunaan alat-alat modern yang mampu mempertahankan keberadaan bangunan-bangunan yang ada (*Kompas-Yogyakarta*, 19/5/2005). Pada mulanya, seakan-akan terlihat bahwa argumen tersebut disandarkan pada hal-hal yang sifatnya teknis dan praktis pragmatis. Dalam penjelasannya lebih lanjut, Sultan menyebutkan bahwa pembangunan areal parkir bawah tanah tersebut berlandaskan pula pada perspektif budaya di mana alun-alun merupakan satu bagian dari kesatuan *catur gatra*: *Kraton – Mesjid-Pasar-dan Alun-alun*. Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa "Secara khusus dalam pemahaman kami tentang Keraton, Alun-alun Utara/Selatan merupakan Keprabon Dalem. Artinya, melekat pada diri pribadi seorang Sultan" (*Kompas*, 9/12/2005). Dengan demikian, sikap dasarnya jelas, Sultan Hamengku Buwono X mengizinkan pembangunan lokasi parkir di bawah tanah di alun-alun tersebut. Kendati demikian, lontaran gagasan tersebut mengundang tanggapan pro dan kontra.

Di samping tanggapan-tanggapan yang telah muncul, perlu ditambahkan satu alasan keberatan lain yang perlu diketengahkan. Dari gagasan yang dilontarkan Sultan Hamengku Buwono X tersebut terasa sekali adanya ketidaksambungan sejarah yang telah menggelisahkan banyak pihak. Pada masa perintisan berdirinya Universitas Gadjah Mada pada tahun 1950-an,

sejumlah bangunan di dalam kompleks Keraton Yogyakarta telah direlakan untuk menjadi tempat perkuliahan. Bahkan, gedung Pagelaran Keraton yang langsung berdampingan dengan alun-alun tersebut menjadi bagian tempat perkuliahan. Saat ini Universitas Gadjah Mada telah memiliki kampus yang terpisah dari kompleks bangunan Keraton Yogyakarta. Untuk mengenang jasa Sultan Hamengku Buwono IX atas keterlibatannya dalam pendirian Universitas Gadjah Mada, setiap tahun diselenggarakan penganugerahan Hamengku Buwono Award untuk pihak-pihak yang berprestasi dalam mengembangkan dunia pendidikan.

Berbagai sikap dan pendapat bermunculan menanggapi rencana Sultan Hamengku Buwono X tersebut. Di antaranya juga melalui sebuah protes yang dikemas dalam *happening arts*. Di alun-alun yang ditawarkan menjadi tempat parkir tersebut, sekelompok seniman melalui bentangan huruf-huruf mengimajinasikan DI SINI AKAN DIBANGUN MALL.⁴⁶ Bisa jadi hal tersebut diinterpretasikan sebagai sebuah representasi dari tradisi *pepe* di mana warga masyarakat menghadirkan diri agar suara keprihatinannya didengar. Atau bisa juga tindakan tersebut merupakan sebuah perwujudan dari tindak kenabian yang meramalkan bahwa di wilayah Keraton Kesultanan Yogyakarta—bahkan pada bagian pusat dari *imago mundi*—akan muncul usaha-usaha ekonomi yang dimaksudkan untuk melayani semangat konsumtif.

Memang benar, alun-alun adalah tanah milik keraton. Secara ekonomis, jika tanah tersebut dibiarkan menganggur akan berarti bahwa tanah keraton tersebut tidak dioptimalkan dalam usaha yang bernilai ekonomis. Dengan dimanfaatkan sebagai lahan parkir diharapkan lahan tersebut akan memiliki nilai tambah. Namun demikian, dengan dijadikannya sebagai lahan parkir (pada bagian di bawah tanah sekalipun), alun-alun akan mengalami perubahan fungsi yang mendasar. Alun-alun hanya akan menjadi fungsi tambahan (*additional*) bagi pusat-pusat perbelanjaan di berbagai tempat lain, terutama di sepanjang Malioboro. Di sisi lain, dengan membiarkan alun-alun sebagai tempat terbuka, ia akan tetap menjadi *centro* (tempat di mana orang dari berbagai tempat datang mengalir), ruang publik yang terbuka di mana warga masyarakat dapat

⁴⁶ CP biennale 2005: *Urban/culture*, (Jakarta: CP foundation, 2005), hlm. 170-173.

melakukan berbagai aktivitas, tempat bertemunya antarwarga masyarakat, atau bahkan hanya sekedar untuk mencari udara segar secara gratis. Di sinilah terjadi sebuah tarik-menarik antara kekuatan kapitalisme dan kepentingan sosial-budaya setempat. Siapa yang akan dimenangkan?

7. SEBUAH PERGESERAN MANUNGGALING KAWULA GUSTI?

Sebagaimana diperlihatkan di atas, di Yogyakarta telah terjadi beberapa gerak perubahan pada dunia ekonomi yang memiliki kaitannya dengan keraton. Pada kasus kompleks Hotel Ambarukma, telah berlangsung perubahan posisi kompleks tersebut. Semula kompleks hotel itu merupakan *supporting system* bagi perkembangan budaya Jawa sekaligus memberi kesempatan pada warga masyarakat ambil bagian dalam kegiatan ekonomi yang menopang kehidupannya, berubah posisinya menduduki garis depan dalam usaha ekonomi yang mengutamakan konsumen pada pusat perbelanjaan yang menyediakan barang kebutuhan dengan jangkauan konsumen yang lebih luas dari penduduk Yogyakarta. Dalam posisi tersebut warga masyarakat sekitar justru kemudian menjadi korban karena kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonominya telah direbut oleh pusat perbelanjaan yang baru itu. Perubahan demikian menimbulkan gejolak dan reaksi sebagaimana telah disebut di atas.

Pada kasus lain yang menawarkan alun-alun menjadi lahan parkir bawah tanah akan memunculkan kebijakan lain yang mengubah posisi alun-alun dari *centro* yang dapat diakses berbagai pihak, tidak dalam sebuah interaksi yang bernilai ekonomis, menjadi instrumen pendukung atau tambahan bagi berbagai pusat perbelanjaan yang ada. Dengan demikian, alun-alun akan kehilangan fungsi sentralnya. Warga masyarakat akan kehilangan ruang publik yang mampu memberi tempat untuk berbagai aktivitas sosial dan budaya. Alun-alun akan berubah menjadi fungsi tambahan yang bernilai ekonomis yang hanya dinikmati oleh sekelompok pihak orang berduit. Dalam hal inilah kemudian yang terjadi adalah berkuasanya kapitalisme yang akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tidak mengherankan bahwa hal itu pun menimbulkan gejolak tersendiri. Pertanyaannya, dalam situasi tersebut bagaimana kepercayaan *manunggaling kawula-gusti* atau *jumbuhing kawula-gusti* menampakkan wujudnya?

Manunggaling kawula-gusti memang merupakan ungkapan yang berasal dan berlaku pada dunia mistik. Zoetmulder telah mengupas asal usul dan makna dari ungkapan tersebut di dalam bukunya.⁴⁷ Prinsip *manunggaling kawula-gusti* tersebut juga menjadi penghayatan hidup bagi sebagian masyarakat Jawa. Mengungkapkan pandangan Sultan Hamengku Buwono IX, Selo Soemardjan menyebutkan bahwa daerah Yogyakarta dengan keraton dan rakyatnya merupakan warisan para leluhur yang di dalamnya terkandung bukan saja warisan material, tetapi juga nilai-nilai adat Jawa, nilai-nilai spiritual, dan nilai-nilai kekuasaan yang kesemuanya itu harus dimanfaatkan antara lain untuk keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyatnya. Kesemuanya terwujud selama keraton disatukan dengan kesejahteraan rakyat. Di situlah *manunggaling kawula lan gusti*.⁴⁸ Namun, dengan munculnya berbagai reaksi dari warga masyarakat atas perubahan yang terjadi karena masuknya kepentingan kapitalisme, akankah pernyataan Selo Sumardjan yang mengungkapkan pandangan Sultan Hamengkubuwono IX tersebut tetap berlaku? Bagaimana dalam situasi masuknya kepentingan kapitalisme dalam relung kehidupan masyarakat Yogyakarta melalui bisnis yang berkaitan dengan keraton tersebut masih mampu mewadahi dan mewujudkan keyakinan *manunggaling kawula gusti*?

Sebuah ungkapan Sultan Hamengku Buwono X dalam kumpulan sambutannya, antara lain berbunyi, "*Kelangan sakehe raja brana ateges ora kelangan apa-apa, kelangan nyawa itu tegese mung kelangan separo, kelangan kapercayan iku tegese kelangan sakabehe*."⁴⁹ (Kehilangan harta benda berarti tidak kehilangan apa pun, kehilangan nyawa berarti hanya kehilangan separo, kehilangan kepercayaan berarti kehilangan segalanya.) Dalam arus globalisasi yang menempatkan pemujaan atas penampilan serta pemilikan barang-barang material, ungkapan tersebut seakan-akan merupakan sebuah perlawanan atas arus global konsumerisme dan kapitalisme yang tengah berlangsung. Mungkinkah hal tersebut diwujudkan secara nyata?

⁴⁷ P.J. Zoetmulder, *Manunggaling Kawula Gusti*, (Jakarta: Gramedia, 1991).

⁴⁸ Nusantara (ed.), *Meneguhkan Tahta ...*, hlm. 55.

⁴⁹ Sri Sultan Hamengku Buwono X, *Bercermin di Kalbu Rakyat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 7.

Mengingat kembali pada pandangan Karl Polanyi di atas, tampaklah sebuah potret ketika dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta pada ranah ekonomi berlangsung pertemuan dua gelombang (*double movement*) antara perluasan ekonomi global dan perlawanannya dari ekonomi setempat. Situasi ini terasa "mengguncangkan" jagat Jawa. Di satu sisi, dalam rangkaian gelombang tersebut tampak sejumlah kebijakan ekonomi dari dua Sultan yang berbeda antara yang satu dan yang lain. Di sisi lain, tampak sejumlah "perlawanan" dari pihak rakyat. Keadaan ini mengajak untuk melihat pemahaman dan pengejawantahan paham *manunggaling kawula gusti* sebagaimana menjadi pandangan dan praktek hidup Sultan Hamengkubuwono IX. Apakah pada zaman ini paham dan pengejawantahan *manunggaling kawula gusti* mampu bertahan melawan sergapan kapitalisme? Ataukah *manunggaling kawula gusti* akhirnya lebur menjadi *manunggaling kawula ing pasar* dalam pertarungan-pertarungan di panggung ekonomi?

11. 1989 [Penyusun Utama] *Etika Sosial. Buku Panduan Mahasiswa PB I - PB VI*, Jakarta: Gramedia, 165 h.
12. 1989 *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, edisi kedua dengan revisi, Yogyakarta: Kanisius, 156 h.
13. 1991 *Wayang dan Panggilan Manusia* (Kumpulan Karangan) Jakarta: Gramedia, 105 h.
14. 1991 *Berfilsafat dari Konteks* (Kumpulan Karangan) Jakarta: Gramedia, 246 h.
15. 1992 *Filsafat - Kebudayaan - Politik. Butir-butir Pemikiran Kritis* (Kumpulan Karangan) Jakarta: Gramedia, 254 h.
16. 1992 *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Kumpulan Karangan) Yogyakarta: Kanisius, 268 h.
17. 1992 *Imamat di Gereja Indonesia*, bersama Refleksi Mahasiswa, Yogyakarta: Pusat Pastoral, Seri Pastoral 202, 40 h.
18. 1993 *Beriman dalam Masyarakat. Butir-butir Teologi Kontekstual* (Kumpulan Karangan) Yogyakarta: Kanisius, 212 h.
19. 1995 *Mencari Sosok Demokrasi. Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 133 h.
20. 1997 *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, Yogyakarta: Kanisius, 214 h.
21. 1997 *Javanese Ethics and World-View. The Javanese Idea of the Good Life*, (Terjemahan dari 1981) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 323 h.
22. 1997 *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato Sampai dengan Nietzsche*, diterjemahkan dan diantar oleh Franz Magnis-Suseno SJ, Yogyakarta: Kanisius, 214 h.
23. 1998 *Mencari Makna Kebangsaan* (Kumpulan Karangan), Yogyakarta: Kanisius, 193 h.
24. 1999 *Pemikiran Karl Marx. Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, XVI+284 h.
25. 2000² *Kuasa dan Moral* (Kumpulan Karangan), edisi ke-2 dgn perubahan Jakarta: Gramedia; 170 h.
26. 2000 *12 Tokoh Etika Abad ke-21*, Yogyakarta: Kanisius, 271 h.
27. 2003 *Dalam Bayang-bayang Lenin. Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 263 h.
28. 2004 *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk* (Kumpulan Karangan), Jakarta: Obor, 275 h.
29. 2004 *Pijar-pijar Filsafat. Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*, (Kumpulan Karangan), Yogyakarta: Kanisius, 301 h.
30. 2005 *Etika Abad ke-20: 12 Teks Kunci*, diterjemahkan dan diantar oleh Franz Magnis-Suseno SJ, Yogyakarta: Kanisius, 292 h.
31. 2006 *Menalar Tuhan*, Yogyakarta: Kanisius, 245 h.

Catatan:

Sebelum 1980 semua publikasi terbit dengan nama resmi FRANZ VON MAGNIS [MAGNIS, FRANZ VON]; sesudahnya kebanyakan dengan nama "alias" FRANZ MAGNIS-SUSENO [MAGNIS-SUSENO, FRANZ]; ada juga yang terbit, karena kekurangan- telitian penerbit, dengan nama Franz von Magnis-Suseno, Magnis Suseno, dlsb.

BIODATA PENULIS

(disusun sesuai dengan urutan bab)

G.P. SINDHUNATA

Lulusan pertama dari program doktorandus Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, tahun 1980. Kemudian ia belajar teologi di Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta, dan selesai tahun 1983. Selanjutnya ia menempuh studi lanjut dalam bidang filsafat di Hochschule für Philosophie, München, Jerman, dan meraih gelar Doktor Filsafat pada tahun 1992, dengan disertasi berjudul *Hoffen auf den Ratu Adil-Das eschatologische Motiv des "Gerechten Königs" im Bauernprotest auf Java während des 19 und zu Beginn des 20 Jahrhunderts* (Menanti Ratu Adil—Motif Eskatologis dari Ratu Adil dalam Protes Petani di Jawa Abad ke-19 dan awal Abad ke-20). Ia imam Serikat Yesus (SJ), dan antara tahun 1983–1986 bekerja sebagai pastor desa di Paroki Pakem, Yogyakarta. Sejak tahun 1977, ia juga aktif sebagai wartawan harian KOMPAS. Dari tahun 1994 sampai sekarang, ia berkarya sebagai penulis dan pemimpin Redaksi Majalah BASIS, Yogyakarta. Ia banyak menulis di media dan beberapa buku, antara lain, *Dilema Usaha Manusia Rasional* (1989), *Sakitnya Melahirkan Demokrasi* (1999).

A. SUDIARJA, SJ

Alumnus STF Driyarkara tahun 1977, ia melanjutkan studi di Universitas Gregoriana, Roma, Italia, sampai gelar Lisensiat Filsafat (1980). Ia imam Katolik Serikat Yesus, dan pernah bekerja sebagai pastor mahasiswa serta koordinator perkuliahan agama Katolik Perguruan Tinggi seluruh Yogyakarta sampai tahun 1986, sebelum melanjutkan studi filsafat di Universitas Gregoriana sampai gelar Doktor (1991). Sepulang studi, ia bekerja sebagai dosen filsafat di Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dan sejak tahun 2003 menjadi dekan. Selain itu, ia juga mengajar di Program Pasca-Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada, Redaktur Pelaksana Majalah BASIS, dan pemimpin Majalah ROHANI. Minatnya meliputi bidang etika, pendidikan, filsafat, sastra, dan keagamaan. Karyanya, antara lain, *Filsafat Moral* (2004), *Jawablah Aku* (2005), *Agama (Di Zaman) yang Berubah* (2006).

G. BUDI SUBANAR

Alumnus STF Driyarkara tahun 1988, ia melanjutkan studi teologi di Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dan selesai tahun 1994. Kemudian ia menempuh studi lanjut di Universitas Gregoriana, Roma, Italia, sampai meraih gelar Doktor pada tahun 2000, dengan disertasi berjudul *The Local Church in the Light of Magisterium Teaching on Mission. A Case in Point: The Archdiocese of Semarang-Indonesia, 1940–1981*. Ia imam Serikat Yesus, dan sejak tahun 2001 bekerja sebagai dosen di Fakultas Teologi Wedabhakti dan Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Buku yang ditulisnya, antara lain, *Kesaksian Revolusioner Seorang Uskup di Masa Perang: Catatan Harian Mgr. A. Soegijapranata, SJ, 13 Februari 1947–17 Agustus 1949* (2003).

B. HERRY-PRIONO

Alumnus STF Driyarkara tahun 1984. Setelah belajar filsafat, ia melanjutkan studi ilmu-ilmu sosial, teologi, sosiologi, dan ekonomi-politik di Manila, Yogyakarta, dan London. Gelar Ph.D. diraih dari London School of Economics (LSE), Inggris. Sekarang ia bekerja sebagai dosen dan Ketua Pro-

gram Studi Pasca-Sarjana STF Driyarkara, serta peneliti lepas. Minat risetnya meliputi filsafat ekonomi, ekonomi-politik, teori sosial, ilmu-ilmu sosial, dan persoalan globalisasi. Ia banyak menulis di media, jurnal, dan buku.

I. WIBOWO

Alumnus STF Driyarkara tahun 1977, ia belajar Sastra Cina di Universitas Indonesia sampai tahun 1983. Kemudian ia belajar ilmu politik di Marquette University, Amerika Serikat, dan meraih gelar MA (1990). Gelar Ph.D. Politik Cina diraih dari School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, tahun 1996. Bersama alumni Universitas Indonesia, ia mendirikan dan menjadi ketua Centre for Chinese Studies, Universitas Indonesia. Sejak tahun 2002 ia bergabung dengan Cindelar Institute for Rural Policy and Global Studies, Yogyakarta. Kini ia mengajar pada Program Studi Cina dan Pasca-Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Karyanya terbit di jurnal, dalam dan luar negeri. Bukunya, antara lain, *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina* (2000), *Neoliberalisme* (editor bersama F. Wahono, 2003), *Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang di Era Globalisasi* (2004).

ROBERT H. IMAM

Alumnus STF Driyarkara tahun 1988, ia melanjutkan studi di Boston College, Amerika Serikat, dan meraih gelar MA di bidang Sejarah Filsafat pada tahun 1992. Sekarang ia sedang menyelesaikan studi untuk gelar Doktor di bidang ekonomi-politik internasional pada Fakultas Sosiologi, Lancaster University, Inggris, dengan tesis berjudul *The Construction of Singapore's Knowledge-Based Economy: A Case for Cultural Political Economy*. Karyanya, antara lain, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah atas Cara-Cara Kerja Ilmu* yang ditulis bersama gurunya di STF Driyarkara, almarhum C. Verhaak, SJ (1989), "Neoliberalisme: Era Baru dan Peradaban Pasar" dalam I. Wibowo & Francis Wahono (ed.) *Neoliberalisme* (2003).